

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON BUDGET MANAGEMENT PERFORMANCE (STUDY ON THE CENTER FOR STATISTICS OF JAMBI CITY AND JAMBI PROVINCE)

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAMBI DAN PROVINSI JAMBI)

Rifky Sumanto¹⁾

Sri Rahayu ²⁾

Misni Erwati ³⁾

¹⁾ *Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi – Indonesia*

^{2 & 3)} *Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi – Indonesia*

Email: rifkysumantoasmansyah@gmail.com¹⁾, sri_rahayu@unja.ac.id²⁾,
misni_erwati@unja.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada Badan Pusat Statistik Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pusat Statistik Jambi. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Pengumpulan data penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa baik secara simultan dan parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada Badan Pusat Statistik Jambi.

Kata kunci: Akuntabilitas, transparansi, kinerja pengelolaan anggaran.

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the effect of accountability and transparency on budget management performance at the Jambi Central Statistics Agency. The population in this study were employees at the Jambi Central Statistics Agency. The sampling technique in this study was a saturated sample with a total sample of 52 respondents. Collecting research data by distributing questionnaires to research respondents. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of the study found that both simultaneously and partially accountability and transparency affect the performance of budget management at the Jambi Central Statistics Agency.

Keywords: Accountability, transparency, budget management performance.

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*) dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat, merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Pelaksanaan *Good Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat. *Good governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Auditya (2013) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah.

Pengelolaan anggaran tersebut harus bersifat transparansi sehingga setiap kegiatan yang sedang maupun yang sudah dilaksanakan mudah diketahui secara umum dan terbuka untuk siapapun baik secara internal maupun secara eksternal. Kadang kala hal ini dianggap sepele dan mudah padahal sangat penting dan urgen karena di beberapa kegiatan muncul kasus yang tidak terduga dan disangka oleh pengelola anggaran. Annisanigrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tinjauan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenang untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik;
2. Penyajian tepat waktu; dan
3. Adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atas norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Setelah semua kegiatan tahapan selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) oleh bendahara, atasan langsung (Sekertaris) serta dibantu staf pengelola keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut di periksa langsung oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Wilayah Sehingga semua dokumen yang berhubungan langsung dapat disediakan secara lengkap dan sempurna.

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrument akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik (Endrayani, 2014). Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kota Jambi pada tahun 2016 – 2018 dibiayai oleh APBN dengan nilai pagu rata-rata sebesar Rp 5.085.901.750,-.

Realisasi Anggaran Belanja BPS Kota Jambi untuk tahun anggaran 2016 – 2018. Pada tahun 2016, realisasi anggaran program DMPTL adalah sebesar 95,89 persen dari pagu anggaran program DMPTL,

realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 99,96 persen dari pagu anggaran program PSPA dan realisasi anggaran program PPIS sebesar 94,28 persen dari pagu anggaran PPIS. Penyerapan PPIS paling rendah diantara program lainnya, hal ini disebabkan anggaran *selfblocking* yang tidak terserap. Penyerapan anggaran BPS Kota Jambi secara keseluruhan adalah sebesar 95,12 persen dari total pagu.

Pada tahun 2017, persen dari pagu anggaran PPIS. Penyerapan PPIS paling rendah diantara program lainnya, hal ini disebabkan anggaran *selfblocking* yang tidak terserap. Penyerapan anggaran BPS Kota Jambi secara keseluruhan adalah sebesar 95,12 persen dari total pagu.

Pada tahun 2018, Pagu awal yang diterima oleh BPS Kota Jambi sebesar Rp4.463.698.000 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program yaitu; 1) Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS (DMPTTL) dengan pagu sebesar Rp3.377.917.000,- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dengan pagu sebesar Rp144.794.000,- dan 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar Rp940.987.000,-.

Sepanjang tahun 2018, BPS Kota Jambi melakukan empat kali revisi. Revisi pertama disebabkan karena adanya perubahan dasar hitung untuk beberapa kegiatan pada program PPIS untuk seluruh wilayah Indonesia. Revisi kedua disebabkan Penambahan belanja modal untuk mempercepat capaian output pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Revisi ketiga disebabkan pengalihan pagu anggaran beberapa output kegiatan yang tidak terserap untuk menutupi kebutuhan komponen gaji dan tunjangan, Revisi keempat disebabkan menutupi pagu minus pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor, dan akun lainnya yang termasuk di dalamnya berkaitan langsung dengan kegiatan yang sudah terlaksana. Pada akhir revisi total pagu BPS Kota Jambi tahun 2018 menjadi Rp 4.317.400.000.

Realisasi anggaran program DMPTL adalah sebesar 97,39 persen dari pagu anggaran DMPTL dan realisasi anggaran program PSPA sebesar 99,19 persen merupakan program dengan persentase realisasi paling tinggi kemudian realisasi program PPIS sebesar 90,23 persen dari pagu anggaran PPIS. Penyerapan PPIS adalah yang terendah, hal ini disebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan meskipun kegiatan tersebut selesai dilaksanakan Penyerapan anggaran BPS Kota Jambi secara keseluruhan adalah sebesar 96,02 persen dari total pagu.

BPS Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian-penelitian terdahulu telah meneliti factor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran antara lain Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2002). Akuntabilitas yang baik juga membutuhkan transparansi karena melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah yang tertuang dalam anggaran daerah. Penelitian Setyaningrum (2017) menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada BUMD di Yogyakarta. Penelitian Hajar (2017) juga menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel Transparansi pengelolaan keuangan daerah di setiap OPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena peneliti tertarik untuk melakukan riset penelitian tentang analisis akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penelitian ini merupakan pengembangan/replikasi dari penelitian Irma setyaningrum 2017, yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan Penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda, dan responden yang digunakan juga berbeda. Penelitian Irma Setyaningrum (2017) yang meneliti Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Penelitian ini mengambil lokasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Jambi, karena adanya fenomena penurunan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari tahun 2016 – 2018. Nilai SAKIP merupakan penilaian oleh inspektorat atas akuntabel birokrasi di BPS Kota Jambi. Pada tahun 2016, BPS Kota Jambi memperoleh nilai SAKIP sebesar 64,06. Nilai ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017 menjadi 65,24. Namun, pada tahun

2018 nilai SAKIP turun menjadi 61.18 (www.jambikota.bps.go.id, 2018). Penurunan capaian Akuntabilitas kinerja dari hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat memberi informasi kepada masyarakat bahwa adanya penurunan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan publik oleh BPS Kota Jambi. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran di BPS Kota Jambi.

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran.
2. Untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran.
3. Untuk memberikan bukti empiris Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) Mahmudi (2010). Pollit secara sederhana mengatakan akuntabilitas adalah sebuah hubungan dimana sebuah pihak tertentu diharuskan untuk melaporkan tindakan-tindakan terhadap pihak. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2005) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Annisaningrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik.
2. Penyajian tepat waktu.
3. Adanya pemeriksaan.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

2.2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Tanjung, 2011). Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Ganie-Rochman, Meuthia (2000) dalam artikel ilmiah Loina Lalolo Krina P. (2003).

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan publik dari setiap kebijakan tersebut.

2.3. Kinerja Pengelolaan Anggaran

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009). Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah. Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan suatu urutan kegiatan yang terencana.

2.4. Kerangka Pemikiran

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setiyanningrum (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada BUMD di Yogyakarta. Hajar (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.

2.4.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaam Anggaran

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setiyanningrum (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada BUMD di Yogyakarta. Hajar (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.

2.4.3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Pengelolaan Anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setiyanningrum (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada BUMD di Yogyakarta. Hajar (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelola Anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.

2.5. Hipotesis Penelitian

H₁ : Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran.

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran.

H₃ : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran,

3. METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka, maka pengumpulan angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif. Analisis kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan maka dapat disimpulkan bahwa analisis kuantitatif adalah analisis data yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menguji suatu hipotesis dengan bantuan alat analisis.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data, digunakan SPSS versi 22.0 (*Statistical Package for Social Science*), yaitu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik dengan basis *Windows* (Ghozali, 2016). Metode analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat diketahui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum. *Mean* digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan.

3.2. Uji Kualitas Instrumen

3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2016).

3.2.2. Uji Reliabilitas

Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2018).

Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur, dalam penelitian ini kriteria yang

digunakan adalah *one shot*, artinya dilakukan satu kali pengukuran saja dan dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antarjawaban pertanyaan. *SPSS* memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2016).

3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang diperoleh kemudian dioleh dan diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan program *SPSS For Window Version 22*, dengan persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja pengelolaan anggaran
α	= Konstanta
β_1 dan β_2	= Koefisien regresi
X1	= Akuntabilitas
X2	= Transparansi
e	= Error

3.4. Uji Hipotesis

3.4.1. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Ghozali, 2016)

3.4.2. Uji t

Pengujian parameter individu (Uji t) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2016). Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai hitung dengan tabel pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria keputusan:

1. Jika $\text{sig.} < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $\text{sig.} > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak

3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai R^2 berada antar 0 dan 1 semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka akan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) dipilihnya *Adjusted R Square* agar tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model, karena tidak seperti R^2 nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model, sedangkan R^2 setiap tambahan satu variabel independen, maka *R Square* pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria penafsiran koefisien korelasi menurut Ghozali (2016) sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penafsiran Indeks Korelasi

No.	Indeks	Korelasi Keeratan
1	0,00-0,20	Sangat lemah
2	0,21-0,40	Lemah
3	0,41-0,70	Kuat
4	0,71-0,90	Sangat kuat
5	0,91-0,99	Sangat kuat sekali

6	1	Sempurna
---	---	----------

Sumber : Ghozali, 2016

4. HASIL

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Total X1	49	3,55	5,00	4,2291	,40772
Total X2	49	3,50	4,90	4,2469	,37199
Total Y	49	3,50	5,00	4,2163	,33994
Valid N (listwise)	49				

Sumber: Data diolah, 2021

Keterangan:

X₁ : Akuntabilitas

X₂ : Transparansi

Y : Kinerja Pengelolaan Anggaran

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebesar 49 data. Variabel akuntabilitas (X₁) memiliki nilai minimum 3,55 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata akuntabilitas (X₁) 4,2291 dengan nilai standar deviasi 0,40772. Variabel transparansi (X₂) mempunyai nilai minimum sebesar 3,50 dan nilai maksimum sebesar 4,90. Nilai rata-rata transparansi (X₂) adalah sebesar 4,2469 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,37199.

Variabel kinerja pengelolaan anggaran (Y) mempunyai nilai minimum 3,50 dan nilai maksimum 5,00. Rata-rata kinerja pengelolaan anggaran (Y) adalah sebesar 4,2163 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,33994.

4.2. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

Berdasarkan output SPSS setelah dilakukan pengujian validitas seluruh item pernyataan yang diajukan pada kuisioner telah valid. Berikut disajikan rincian pengujian validitas pada table 4.3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Akuntabilitas (X₁), Transparansi (X₂), dan Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)

Variabel	No. Item Pernyataan	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	1	0,233	0,107	0,2816	Tidak Valid
	2	0,687	0,000		Valid
	3	0,655	0,000		Valid
	4	0,558	0,000		Valid
	5	0,698	0,000		Valid
	6	0,674	0,000		Valid
	7	0,686	0,000		Valid
	8	0,739	0,000		Valid
	9	0,667	0,000		Valid
	10	0,726	0,000		Valid
	11	0,709	0,000		Valid
	12	0,718	0,000		Valid
	13	0,654	0,000		Valid
Variabel	No. Item Pernyataan	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan

	14	0,716	0,000		Valid
	15	0,602	0,000		Valid
	16	0,578	0,000		Valid
	17	0,556	0,000		Valid
	18	0,658	0,000		Valid
	19	0,582	0,000		Valid
	20	0,606	0,000		Valid
	21	0,672	0,000		Valid
	22	0,575	0,000		Valid
Transparansi (X2)	1	0,658	0,000	0,2816	Valid
	2	0,603	0,000		Valid
	3	0,406	0,000		Valid
	4	0,684	0,000		Valid
	5	0,445	0,000		Valid
	6	0,489	0,000		Valid
	7	0,530	0,000		Valid
	8	0,480	0,000		Valid
	9	0,810	0,000		Valid
	10	0,563	0,000		Valid
Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y)	1	0,649	0,000	0,2816	Valid
	2	0,431	0,000		Valid
	3	0,703	0,000		Valid
	4	0,328	0,000		Valid
	5	0,538	0,000		Valid
	6	0,552	0,000		Valid
	7	0,482	0,000		Valid
	8	0,511	0,000		Valid
	9	0,607	0,000		Valid
	10	0,543	0,000		Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui r hitung dari semua variabel (Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Pengelolaan Anggaran) dalam semua item pertanyaan adalah valid karena r hasil > dari r tabel (df 49 – 2 = 47, 5%, 0,2816). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari variabel, kecuali item pertanyaan akuntabilitas pertama yang tidak valid.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran keandalan untuk masing-masing variabel bebas dan variabel terikat memenuhi persyaratan $\alpha > 0.70$. Berikut disajikan hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas	0,929
Transparansi	0,775
Kinerja Pengelolaan Anggaran	0,727

Pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Cronbach's Alpha, yaitu apabila cronbach alpha > 0,7 maka item pertanyaan tersebut adalah reliabel. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS, maka dapat diketahui bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja pengelolaan anggaran adalah reliabel karena memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian memiliki reliabilitas atau ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.

4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan anggaran. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,207	,433		2,788	,008
	Total X1	,282	,104	,338	2,704	,010
	Total X2	,428	,114	,468	3,743	,001

a. Dependent Variable: Total Y

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pengelolaan Anggaran

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Konstanta sebesar 1,207. Artinya jika variabel akuntabilitas dan transparansi, sama dengan nol, maka kinerja pengelolaan anggaran (Y) bernilai sebesar 1,207.
2. Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,282. Artinya, jika akuntabilitas mengalami kenaikan, maka kinerja pengelolaan anggaran (Y) juga akan mengalami peningkatan.
3. Koefisien regresi untuk variabel transparansi sebesar 0,428. Artinya, jika transparansi mengalami kenaikan, maka kinerja pengelolaan anggaran (Y) juga akan mengalami peningkatan.

4.3.1. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan anggaran secara simultan.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,852	2	1,426	24,342	,000 ^b
	Residual	2,695	46	,059		
	Total	5,547	48			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X2, Total X1

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 24,321 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

4.3.2. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan secara parsial. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan anggaran.

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,207	,433		2,788	,008
	Total X1	,282	,104	,338	2,704	,010
	Total X2	,428	,114	,468	3,743	,001

a. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:

1. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t 2,704 dan signifikansi $0,010 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.
2. Variabel transparansi (X2) memiliki nilai t 3,743 dan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

4.3.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi/ R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah (Ghozali, 2016).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 ^a	,514	,493	,2420

a. Predictors: (Constant), Total X2, Total X1

b. Dependent Variable: Total Y

Perhitungan pada tabel diketahui *adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,493. Hal ini berarti bahwa 49,3% kinerja pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sedangkan selebihnya 50,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi pengawasan masyarakat (Oktasari, 2016), pengawasan internal (Triwandari, Sujana, dan Putra, 2015).

5. PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas dan Transparansi, secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran di BPS Jambi. Semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi maka semakin tinggi pula kinerja pengelolaan anggaran. Kinerja pengelolaan anggaran BPS Jambi sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sedangkan selebihnya 50,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran memiliki nilai sig. 0,010 dimana nilai sig. $< 0,05$ sehingga hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran BPS Jambi. Akuntabilitas di BPS Jambi sudah baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran BPS Jambi. Hal ini dapat dijelaskan dari nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 4,2291 yang tergolong baik. Nilai dari masing-masing dimensi akuntabilitas juga tinggi. Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran mendapatkan respon positif (sering = skor 4 dan selalu = skor 5) dari responden sebesar 89,4%. Dimensi manajerial mendapatkan respon positif

dari responden sebesar 86,7%. Dimensi program mendapatkan respon positif dari responden sebesar 88,8%. Dimensi kebijakan mendapatkan respon positif dari responden sebesar 90,5%. Dimensi finansial/keuangan mendapatkan respon positif dari responden sebesar 89,8%. Secara keseluruhan akuntabilitas dinilai positif oleh responden sebesar 89%.

5.3. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran memiliki nilai sig. 0,001 dimana nilai sig. < 0,05 sehingga hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran BPS Jambi. Semakin baik transparansi maka semakin tinggi kinerja pengelolaan anggaran. Variabel transparansi terdiri dari tiga dimensi, yaitu keterbukaan, aksesabilitas, dan publikasi. Penerapan transparansi di BPS Jambi telah dilakukan dengan baik. Nilai rata-rata transparansi sebesar 4,2469 yang tergolong baik. Nilai dari masing-masing dimensi transparansi juga tinggi. Dimensi keterbukaan mendapatkan respon positif (sering = skor 4 dan selalu = skor 5) dari responden sebesar 87,8%. Dimensi aksesabilitas mendapatkan respon positif dari responden sebesar 89,8%. Dimensi publikasi mendapatkan respon positif dari responden sebesar 87,3%. Secara keseluruhan transparansi dinilai positif oleh responden sebesar 88,0%.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil analisa yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi, secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran di BPS Jambi.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran di BPS Jambi.
3. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran di BPS Jambi.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BPS Jambi, terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga kinerja pengelolaan anggaran akan semakin baik di masa yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga turut mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).
- Adiwirya, M. Firdiansyah, et al. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada SKPD kota Denpasar. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Anugriani, Rezky Mulia. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. Skripsi Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Andrianto, Nico.2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui eGovernment Bayu Media. Malang
- Auditya, Lucy. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Universitas Bengkulu
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2010.Akuntansi Sektor Publik: SuatuPengantar, EdisiKetiga. Jakarta: Erlangga.
- Dessler, Gary. 2013. Human Resource Management, 13th Edition. London: Pearson Prentice Hall Inc.
- Hadyrianto, Pahala. 2016. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. Jurnal Akuntansi Universitas Bina Nusantara.

Hajar, NuzulIbnu. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. Skripsi Akuntansi Universitas Halu Oleo.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hapwood dan Tomkins juga Elwood (2005:10) yang diterjemahkan oleh Mahmudi, bahwa "Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik. Jurnal Akunansi

Lalolo Krina P, "indicator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi" [Http//good governance: Bappenas.go.id/informasi.Htm](http://goodgovernance.bappenas.go.id/informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Laoli, Victorinus. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Nias. Riset & Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1 Februari 2019. e –ISSN: 2548-9224.

Laporan Kinerja BPS Kota Jambi 2016. Diakses dari :www.bps.go.id

Loi, Suryaningsih. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. Skripsi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen.

Mahmudi (2010), Manajemen Kinerja Sektor Pu blik, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

----- 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Oktasari, Rosy. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Pengawasan Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ramandei, P. 2009. "Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)." Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.

Setiyannigrun, Irma. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money pada BUMD di Yogyakarta. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Triwandari, DesakNyoman, et al. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Internal terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for money. Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

Werimon, Simson, dkk. 2007. "Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah". Jurnal SNA X. Hlm. 1-22.

www.jambikota.bps.go.id